



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

**RENCANA KERJA TAHUNAN
(RENJA)
TAHUN 2023**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

KABUPATEN MERANGIN

Jalan Pemuda Komp. IBRD KM. 2 Bangko

Telp./fax. (0746) 21185

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2023.

Penerbitan buku Rencana Kerja ini bertujuan untuk menginformasikan tentang Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2023 dan sekaligus jadwal pelaksanaannya. Selain itu dengan diterbitkan buku ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan Renja. Selanjutnya kami juga menyadari bahwa Renja ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu apapun bentuk saran dan kritik yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga penerbitan Renja ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.

Bangka, 10 Juni 2022

**KERALA DINAS SOSPPPA
KABUPATEN MERANGIN**

Drs. ELVIS SURYADINATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640509 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	13

BAB II HASILEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	19
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	22
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ERANGKAT DAERAH.....	28
2.4 REVIEW TERHADAP RKPD.....	31
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ...	32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	33
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	34
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ERANGKAT DAERAH

4.1 INDIKATOR KINERJA.....	41
4.2 LOKASI KEGIATAN, KEBUTUHAN DANA INDIKATIF, SUMBER DANA	41

BAB V. PENUTUP.....	42
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai amanat undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemerintah daerah dan undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dan penjabaran dari rencana jangka menengah pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan RPJMD. Penjabaran RPJMD harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini berisi program dan kegiatan serta indikator yang harus dicapai oleh OPD. Untuk menyusun dan mencapai target tersebut maka dibuat Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja). Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Forum OPD untuk di tindak lanjuti ke tingkat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2023, dimana berbagai usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan bersama-sama merencanakan kebijakan program, pendanaan dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 mendatang.

I.1. LATAR BELAKANG

Untuk mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, kemudian dituangkan dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menyusun Dokumen Rancangan Awal Renja.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Merangin.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Merangin yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, karena Renja Merupakan pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub kegiatan di organisasi pemerintah daerah yang pada akhirnya menjadi dasar untuk menyusun program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

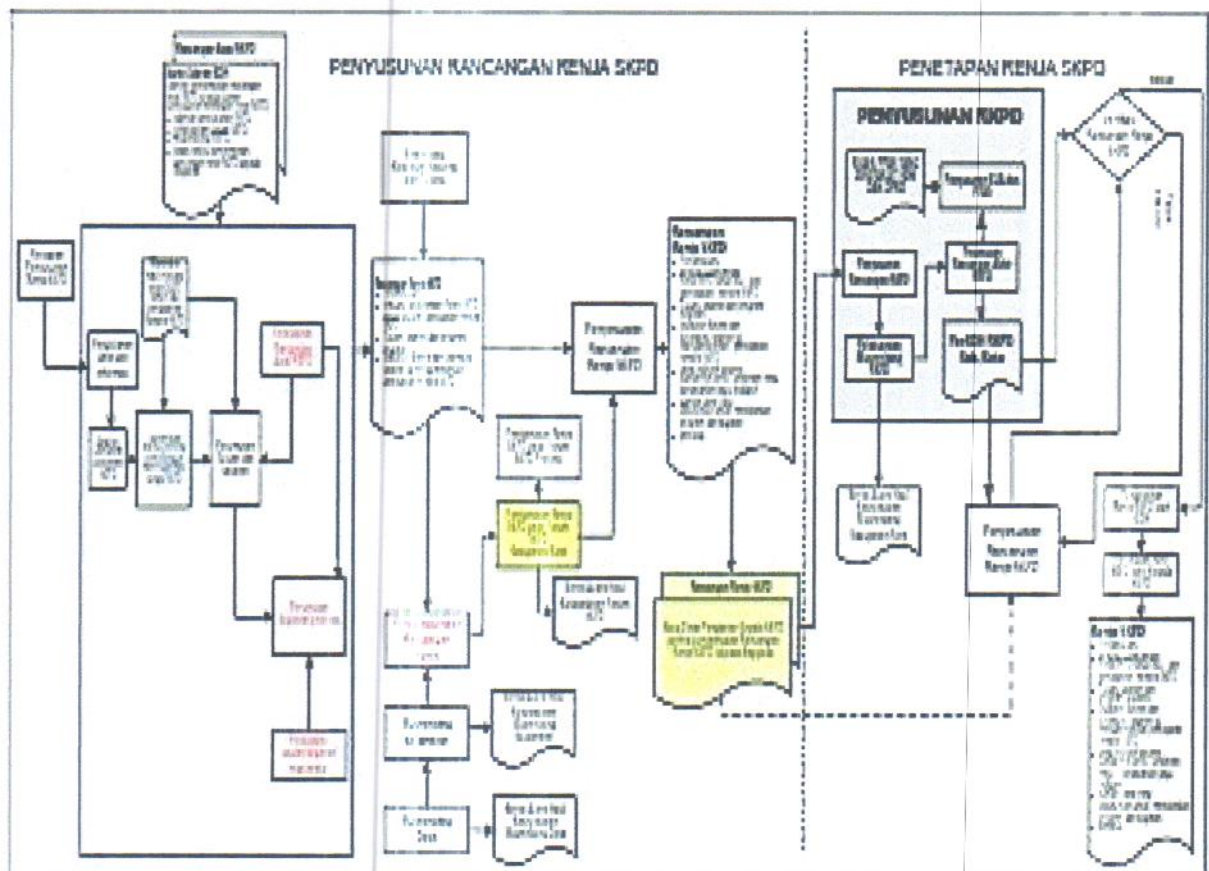
1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan/Sub kegiatan prioritas OPD pada tahun rencana anggaran dilaksanakan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.

2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD dengan memperhatikan memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



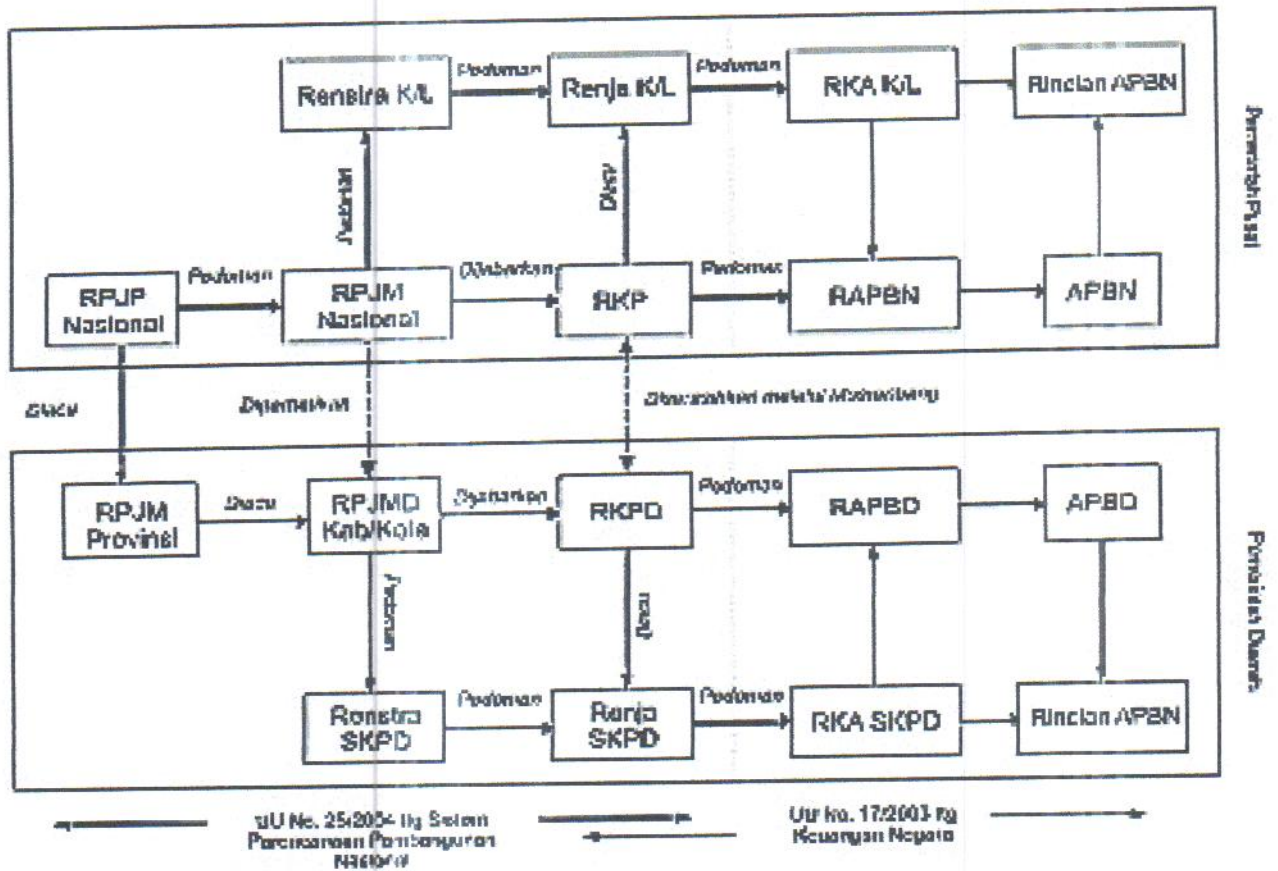
Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - ❖ Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - ❖ Orientasi mengenai Renja
 - ❖ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - ❖ Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - ❖ Pengolahan data dan informasi
 - ❖ Analisis gambaran pelayanan OPD
 - ❖ Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
 - ❖ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - ❖ Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - ❖ Perumusan tujuan dan sasaran
 - ❖ Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - ❖ Perumusan kegiatan prioritas
 - ❖ Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
 - ❖ Penyempurnaan rancangan kerja OPD
 - ❖ Pembahasan forum OPD dan
 - ❖ Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dengan penganggaran dibawah ini :

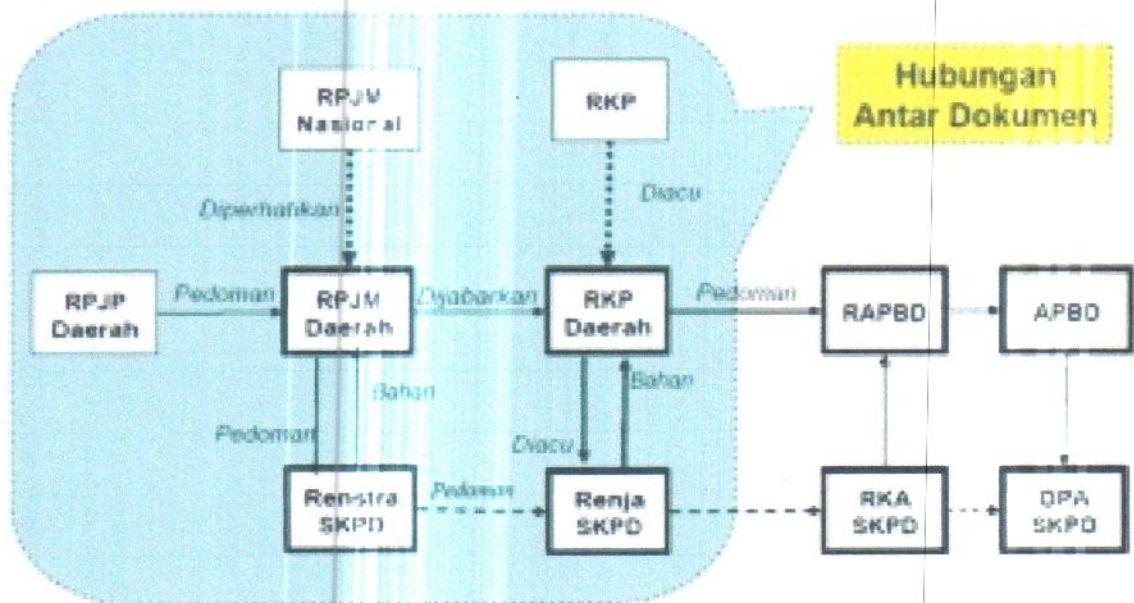


Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan

jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan hubungan antar dokumen perencanaan daerah

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

- Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Sebagaiman Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang

Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016

- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015 - 2019 ;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Daerah;
 - 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;**
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
35. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang standar Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota;
36. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016–2021;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
41. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38)
42. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Merangin 2019 – 2023.

43. Kepmendagri 050-3078 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan Keuangan Daerah;
44. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tentang program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023, sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengoperasionalkan RKP Kabupaten Merangin tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin selama tahun 2023.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DINAS SOSPPPA Kabupaten Merangin, agar

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan dan penganggaran Perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengambarkan Outline penulisan Renja Dinas social,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang muatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Dalam bab 2.1 juga memuat tentang pencapaian target Renstra dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Sejah mana tingkat kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

perangkat daerah; dan

- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian Mengenai :

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: merdapat rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan/sub kegiatan cocok Namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun Berdasarkan Hasil Pengumpulan Informasi Perangkat Daerah Provinsi Dari Penelitian Lapangan dan Pengamatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang sinergisitas arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan di dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan di DINSOSPPPA.
- Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Rencana Program dan Kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan di dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin tahun 2023

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menguraikan tentang Indikator Kinerja, Kelompok sasaran serta lokasi kegiatan dan kebutuhan dana indikatif dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang isu rekomendasi terhadap pencapaian kinerja OPD dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik dalam rangka strategi pelaksanaannya maupun ketersediaan dan kemampuan anggaran,serta kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2023-2=2022) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

No	PROGRAM	TARGET	REALISASI
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	39,79%	31,81%
2.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	74,07%	29,62 %

2. Realisasi Program /Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

No	PROGRAM	TARGET	REALISASI
1.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6,28%	17,99%
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	39,79%	31,81%
3.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	20 %	55%
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	75 %	100 %
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1 Lokasi	1 Lokasi

6.	PROGRAM PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100%	100%
7.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1 Dokumen	1 Dokumen
8.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nindya	Pratama
9.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	74,07%	29,62 %

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

No	PROGRAM	TARGET	REALISASI
1.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6,08%	11%
2.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	20 %	55%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	75 %	100 %
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100%	100%

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian indikator dan sasaran Program Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
- a. Terbantunya masyarakat yang terkena musibah baik bencana alam maupun bencana sosial lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - b. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Suku Anak Dalam untuk berwirausaha

- c. Terbantunya anak terlantar, jompo terlantar serta penyandang cacat serta penyandang penyakit sosial lainnya dalam mendapatkan akses layanan rehabilitasi sosial.
- d. Meningkatnya kualitas data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Merangin.
- e. Meningkatnya akses layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- f. Meningkatnya kualitas layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui Rumah Perlindungan.
- g. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Merangin.

5. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab .

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang ditempuh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam mengatasi factor – factor penyebab Implikasi capaian indikator Program dan Sasaran Program adalah :

1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui :
 - a. Pemberian Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin.
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan berbagai penyandang masalah sosial
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana.
 - d. Peningkatan kualitas data PMKS setiap tahun serta
 - e. Pemberdayaan Ekonomi bagi warga KAT.
2. Meningkatkan peran lembaga sosial, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial, melalui :

- a. Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan sosial
 - b. Meningkatkan profesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - d. Meningkatkan peran organisasi sosial guna mendorong pemberdayaan Lembaga Sosial sebagai potensi kesejahteraan sosial.
 - e. Meningkatkan pembinaan bagi veteran dan keluarganya
3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :
- a. Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif
 - b. Melakukan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan serta pencatatan dan pelaporan KDRT
 - c. Penyiapan Peraturan Daerah tentang peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
 - d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan dasar kesehatan dan pendidikan yang ramah anak
 - e. Memfasilitasi pembentukan forum anak daerah dan pembinaan
 - f. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak
 - g. Melakukan sosialisasi perlindungan anak.
 - h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender

- i. Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas pokja PUG, Tim Teknis PUG, Pokal Point dalam PPRG, Pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG
- j. Peningkatan kapasitas bagi organisasi perempuan
- k. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan termasuk pelatihan, pendidikan politik perempuan dan penyiapan kader politik perempuan.
- l. Peningkatan wawasan bagi kaum perempuan dalam mengelola usaha serta mempublikasikan hasil karya perempuan.

Untuk Melihat Rekapitulasi realisasi renja dapat dilihat pada lampiran 2.1

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berkewajiban untuk melaksanakan SPM sesuai target yang sudah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019 - 2023.

Ditinjau dari segi hukum SPM bidang sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dapat bersifat "*beziking*" yaitu penetapan materi yang telah diatur oleh payung hukum yang lebih tinggi, namun bersifat juga "*regeling*" yaitu pengaturan materi dapat ditambahkan sesuai kemampuan pihak yang mendapat materi pengaturan. SPM bidang sosial merupakan penjabaran dari target yang telah dipandu oleh Kementerian Sosial.

Berdasarkan kajian diatas terdapat beberapa capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sampai dengan posisi 31 Desember 2022 sebagai berikut :

A. Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Program dan Kegiatan bidang Sosial, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Kategori
1.	Persentase Keluarga Miskin dan rentan yang meningkatkan kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	6,28%	17,99%	Sangat Berhasil
2.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberfungsian sosialnya	39,75%	31,81 %	Berhasil
3.	Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya	20%	55%	Sangat Berhasil
4.	Persentase Sumber Dana Bantuan Sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60%	0%	Tidak berhasil
5.	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	83,33%	100%	Sangat berhasil
6.	Persentase warga KAT yang meningkatkan kualitas hidupnya	1 Kelompok	1 Kelompok	Sangat berhasil
7.	Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	1 Lokasi	Sangat berhasil

B. Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Program dan Kegiatan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Kategori
1.	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Berhasil
2.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Nindya	Pratama	Berhasil
3.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100%	Sangat Berhasil
4.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	74,07%	29,62%	Cukup Berhasil

C. Kinerja pelayanan berdasarkan indikator SPM, sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, berupa :
 - ❖ Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 19,23% atau setara dengan 10 Orang dan realisasi 10 Orang atau setara 100 %.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial berupa :
 - ❖ Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 20 % atau setara dengan 20 Orang pada Tahun 2022 dan realisasi 15 Orang atau setara 75 %.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial, berupa :
4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 20% atau setara dengan 16 Orang pada Tahun 2022 dan realisasi 16 Orang atau setara 100 %.
5. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial, berupa :
 - ❖ Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti dengan target sebanyak 20% atau setara dengan 1 Orang pada Tahun 2022 dan realisasi 1 Orang atau setara 100 %.
6. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota, berupa :

Persentase Korban Bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat dengan target sebanyak 20% atau setara dengan 100 Orang pada tahun 2022 dan realisasi 55 Orang atau setara 55%. Hal ini berdampak positif bagi Kabupaten Merangin dikarenakan terjadi penurunan yang signifikan terkait dengan bencana di Kabupaten Merangin

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tampak pada tabel 2.2 dibawah ini :

Indikator	Data Awal	Capaian 2020		Capaian 2021		Target 2022		Capaian 2022	
		JLH	Jlh	Jlh	%	Jlh	%		
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti : ❖ Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	52 Orang	10 Orang	18 Orang	18 Orang	180 %	10 Orang	19,23 %	10 orang	100 %
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Luar Panti : ❖ Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 Orang	0	3	3	15 %	20 Orang	20 %	15 orang	75 %
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti : ❖ Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	500 Orang	507 Orang	42 Orang	42 Orang	42%	16 Orang	100 %	16 orang	100 %
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti : ❖ Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	10 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	1 Orang	20 %	1 Orang	100 %

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota :									
❖ Persentase korban bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat	2.500 Orang	39 Orang	43 Orang	43 Orang	8,6%	100 Orang	20%	55 Orang	55%

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :
 - 1) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
 - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.
 - 3) Belum akuratnya data fakir miskin di Kabupaten Merangin.
 - 4) Masih tingginya korban bencana alam, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam maupun ulah manusia
 - 5) Belum optimalnya pemberdayaan suku anak dalam
 - 6) Belum semua Perangkat Daerah di kabupaten merangin yang melaksanakan PPRG
 - 7) Masih rendahnya Partisipasi Perempuan dalam legislatif, Tahun 2020 Jumlah

perempuan anggota legeslatif sebanyak 1 Orang.

- 8) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
- 9) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 10) Belum semua korban kekerasan mendapatkan penanganan yang optimal
- 11) Belum tersedianya sistem data terpadu perempuan dan anak
- 12) Masih kurangnya peran forum anak daerah
- 13) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab/Kota, yang disebabkan oleh :

➤ Ketersediaan Anggaran yang masih kurang

a. Peluang

Adapun Peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Tersedianya Rumah Aman dan Mobil Perlindungan
- ❖ Sosialisasi Tentang Konsep Gender dan Perlindungan Anak pada Masyarakat
- ❖ Tersedianya TKSK, Pendamping PKH, Pekerja Sosial Profesional, TAGANA, PSM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
- ❖ Kebijakan Penanganan penanggulangan kemiskinan merupakan Program Prioritas Nasional yang wajib untuk dilaksanakan bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- ❖ Kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) telah tertuang dalam RPJMD
- ❖ Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana salah satu urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah ***Bidang Sosial***
- ❖ Adanya Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta
- ❖ Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

- ❖ Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah
- ❖ Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak
- ❖ Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- ❖ Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

3. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

NO	Tujuan	Program	Indikator Program
1.	Menurunkan Jumlah PMKS	Program pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Diberdayakan untuk menyelenggarakan

			Kesejahteraan Sosial
2.	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

. Adapun isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Belum optimalnya Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial (Kessos).
3. Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4. Belum Tercapainya Kabupaten/Kota Layak Anak.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang sosial maupun bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk setiap tahun anggaran .
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Batten up).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif khususnya dan masyarakat pada

umum nya sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Secara rinci review terhadap Rancangan RKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2022 tampak pada tabel 2.3 dibawah ini : (Lampiran)

II.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam bentuk berita acara musrenbang kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program dan kegiatan/sub kegiatan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing perangkat daerah yang ada di tingkat Kecamatan
4. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada tahun 2022 saat ini belum dapat kami sajikan, hal ini dikarenakan belum adanya usulan dari kecamatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain Program Nasional yang akan dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2022 oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia serta Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, provinsi sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
Program Nasional : **Percepatan pengurangan kemiskinan**
Program Provinsi : Program Perlindungan dan jaminan Sosial
Program OPD : Program Perlindungan dan jaminan Sosial
2. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
Program Nasional : **Mendorong Pembangunan Gender**
Program Provinsi : - Program Perlindungan Perempuan
- Program Pemenuhan Hak Anak
Program OPD : - Program Perlindungan Perempuan
- Program Pemenuhan Hak Anak

III.2. Tujuan dan sasaran Renja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin

Penetapan tujuan dan sasaran renja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan strategis yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

a. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan Jumlah PMKS
2. Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

b. Sasaran

Sementara itu sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Meningkatnya Pembangunan Perempuan
4. Dan ditata kelola Pemerintahan sasarannya adalah meningkatnya kualitas SAKIP DINSOSPPPA Kabupaten Merangin.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Merangin
Tahun 2019-2023.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran
					Tahun 2020	Tahun 2023
1.	Menurunkan Jumlah PMKS		Persentase Penurunan PMKS	%	5,30	5,82 %
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	%	42,27	42,79%
2.	Meningkatkan peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indek Pembangunan Gender (IPG)	%	87,98	88,37
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	4,0	2,5
			IPG Perempuan	%	0	0

III.3. Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan kegiatan/sub kegiatan rutin setiap tahun yang merupakan urusan penunjang pemerintah daerah.
2. Program dan kegiatan yang bersifat mendukung prioritas Nasional sehingga hal tersebut dapat terlaksana oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam hal mendukung pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan provinsi jambi.
3. Program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas masing – masing urusan sosial maupun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berupa penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Urusan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, sebagai salah satu OPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan :

- 1) urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial
- 2) urusan wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam visi dan misi organisasi kepala daerah.

Bentuk indikasi pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, maka tahapan-tahapan dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tujuan dan sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Adapun program-program Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 10 Program dan 22 Kegiatan Dari 51 Sub Kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 6.468.997.963, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	URAIAN PROGRAM
A.	PROGRAM UTAMA	
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Program Rehabilitasi Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberpungisian sosialnya. Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Pencapaian NSPK dan SPM.
2.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Program Penanganan Bencana, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya. Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Proram in Juga Merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs dan Pencapaian NSPK dan SPM Bidang Sosial.
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Keluarga Miskin dan Rentan

			<p>yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar.</p> <p>Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Pencapaian NSPK dan SPM.</p>
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		<p>Program Pemberdayaan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Sumber Dana Bantuan Sosial Masyarakat yang dikelola Untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Persentase PSKS yang Berperan Aktiv dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Persentase warga KAT yang Meningkatkan Kualitas Hidup.</p> <p>Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Pencapaian NSPK dan SPM.</p>
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN PAHLAWAN	MAKAM	<p>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, kinerja yang ingin dicapai adalah Taman Makam Pahlawan yang dikelola.</p> <p>Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.</p>
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		<p>Program Perlindungan Perempuan , Kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani.</p>

			Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Pencapaian SDGs
7.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Kinerja yang ingin dicapaia adalah Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG. Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Pencapaian SDGs
8.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Kinerja yang harus dicapai Jumlah Dokumen data terpilah gender dan anak yang disediakan. Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Pencapaian SDGs
9.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Kinerja yang Harus dicapai adalah Kabupaten/Kota Layak Anak. Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Pencapaian SDGs.
B.	URUSAN PENUNJANG		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- C. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah : Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan pada tahun mendatang.
- D. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel 3.2 sebagai berikut :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

IV.I Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Merangin tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasar dengan target pada tahun 2022 sebanyak 42,62%.
2. Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target pada tahun 2022 sebanyak 3,0 %.
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target pada tahun 2021 sebanyak 54,61%.

IV.2 Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif, Sumber Dana

Secara rinci lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif serta sumber dana kegiatan pada tahun 2022 tampak pada tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah Tahun 2023 Kabupaten Merangin sebagaimana terlampir

BAB V

PENUTUP

a. Rekomendasi Pelaksanaan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui usulan tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- c. Rencana tindak lanjut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada tahun 2023 mendatang akan menetapkan 10 Program dan 22 Kegiatan Dari 51 Sub Kegiatan . Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Merangin tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Ranwal rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2023 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah mencakup semua program pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Bangka, ⁴⁰Juni 2022

**KEPALA DINAS
SOSPPPA KAB. MERANGIN**

Drs. ELVIS SURYADINATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640509 199903 1 003

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN MERANGIN

KODE	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cetakan Peningkat	Praktisi Majo Rencana Tahun 2023		SPO Penanggung Jawab
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana / Page Indikatif	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana / Page Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				4,782,493,541	7				
1 06 01 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin	100 %	106,118,000					Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Merangin	100 Laporan	3,118,000	APBD	1	180 Surat	3,273,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Merangin	48 Laporan	79,000,000	APBD	2	12 Bulan	82,950,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	13 Laporan	19,000,000	APBD	3	12 Bulan	19,950,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Merangin	100 %	363,023,541				412,674,718	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06 1	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	18 Unit	6,000,000	APBD	4	18 Jenis	6,300,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	12 Paket	33,963,541	APBD	5	12 Bulan	35,061,718	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Merangin	12 Paket	13,805,000	APBD	6	18 Es	14,495,350	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Merangin	12 Dokumen	19,255,000	APBD	7	31 Media Massa	20,217,750	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SIGD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Merangin	120 Laporan	320,000,000	APBD	8	84 Kali	336,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin		70,000,000				73,500,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Merangin	14 Unit	20,000,000	APBD	9	15 Unit	21,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralihan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralihan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Merangin	8 Unit	40,000,000	APBD	10	15 Unit	42,000,000	
1 06 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Merangin	2 Unit	10,000,000	APBD	11	10 Unit	10,500,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin		160,000,000	APBD			168,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbiayannya	Kab. Merangin	21 Unit	140,000,000	APBD	12	21 Unit	147,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Merangin	17 Unit	20,000,000	APBD	13		21,000,000	

No	Kode	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Volume	Unit	APBD	Kab. Merauke	1 Unit	APBD	Kab. Merauke	1 Unit	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.09 09	Pembelian/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi		1 Unit							Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin Sumber Daya Manusia		%	325,879,000	Kab. Merauke		APBD			Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.06 02	Pengisian Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		24,073,000	Kab. Merauke		APBD		128 Sesi	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.06 03	Penyusunan dan Perbaikan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		283,203,000	Kab. Merauke		APBD			
1	06 01 2.06 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peraturan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengikuti Simtek	4 Orang		18,000,000	Kab. Merauke		APBD		18 Orang	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		3,687,785,000	Kab. Merauke		APBD			Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/12 Bulan		3,300,000,000	Kab. Merauke		APBD		12 Bulan	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.02 03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		150,980,000	Kab. Merauke		APBD		12 Bulan	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		6,533,000	Kab. Merauke		APBD		1 Dok	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.02 08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulun/Trivulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulun/Trivulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulun/Trivulan/Semester SKPD	1 Laporan		9,850,000	Kab. Merauke		APBD		1 Dok	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		50,852,000	Kab. Merauke		APBD			Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok		25,917,000	Kab. Merauke		APBD		5 Dok	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok		9,472,000	Kab. Merauke		APBD		2 Dok	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok		9,472,000	Kab. Merauke		APBD		2 Dok	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5,831,000	Kab. Merauke		APBD		5 Dok	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			14,000,000	Kab. Merauke		APBD			Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		14,000,000	Kab. Merauke		APBD		1 Dok	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Peningkatan Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lemot, Lelaja Terantar-Serta Gelandangan dan Penderita yang berkembang keberpangsaan nobilitas	43.88%		304,713,000	Kab. Merauke					Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lemot, Lelaja serta Gelandangan Penderita di Luar Pantai Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lemot, Lelaja serta Gelandangan Penderita di Luar Pantai Sosial	132 Orang		184,713,000	Kab. Merauke		APBD		132 Orang	Dinas SOSPPA Kab. Merauke

1	6	4	2.01	1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemukiman, Kabupaten Merangin Sosial dengan Sumber Gas Minirail Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	132 Orang	36.122,0-R	APBD	28	132 Orang	37.009.110	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Siring	Jumlah Orang yang Menernai Paksi dan Kelayakan Lainnya yang Tersisa dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	132 Orang	34.538,285	APBD	37	132 Orang	36.390.278	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Aki Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Aki Baru dan Aki Baru Penga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	60 Orang	46.637,267	APBD	28	60 orang	52.328.130	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.01	06	Perbaikan Binokular Sosial, Koneksi Volume Penderita Diabetes, Anak Terantar, Lemah Telinga, atau Gelendang Pinggang dan Masyarakat	Jumlah Peserta Binokular Sosial kepada Keluarga Penderita Diabetes, Terantar, atau Gelendang Pinggang dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	132 Orang	35.915,425	APBD	29	132 Orang	35.641.191	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.02	14	Rehabilitasi Sosial Penyandang Handicap Keajaiban Sosial (PHKS) Lainnya Bidan Korban HIV/AIDS dan Hipusa di Luar Parali Sosial	Penyusunan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	1 Dokumen	150.000,000	APBD	140 Orang	140 Orang	137.500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.02	14	Kepuasan Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	1 Dokumen	150.000,000	APBD	33	140 Orang	157.000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	8			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyusunan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	20%	136.987,300	APBD	25 %	25 %		Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	06	2.01		Pertindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	900 Orang	128.667,300	APBD	500 Orang	500 Orang	133.515,665	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Masalah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemukiman Baru dalam Masa Tiga Bulan (Pengembangan) dan Rasio Berhenti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	60.000,000	APBD	31	500 Orang	61.000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Siring	Jumlah Orang yang Mendapatkan Paksi dan Kelayakan Lainnya yang Tersisa, pada Masa Tiga Bulan (Pengembangan) dan Rasio Berhenti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	46.987,310	APBD	32	500 Orang	49.111,665	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Pemungutan Pengundi	Jumlah "emas" Pengundi" Maksimal, Maksimalisasi	Kab. Merangin	1 Dok	20.000,000	APBD	33	500 Orang	21.000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	5			PROGRAM (PERLUKONGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penyusunan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	5,48 %	300.846,300	APBD	5,48 %	5,48 %	315.889,140	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02	01	Pengelolaan Bata Merah Halus Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	1 Dok	300.846,300	APBD	1 Dok	1 Dok	315.889,140	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02	01	Pendapatan Pakir Madin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rinc. Madin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Merangin	2000 Orang	200.846,600	APBD	34	1 Dok	210.889,148	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02	03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Kelangka	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Keluarga	100.000,000	APBD	35	1 Kali	105.000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Penyusunan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	80%	60.000,000	APBD	90%	90%	69.000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.02	02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	91,67 %	108.364,000	APBD	91,67 %	91,67 %	111.652,200	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinergisasi Penerimaan dan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Undian yang Mendapatkan Undian Gratis dan Undian Berhadiah	Kab. Merangin	1 Dokumen	60.000,000	APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	61.000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	8 PKRS	108.364,000	APBD	5 PKRS	5 PKRS	111.652,200	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Pemas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Pemas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	24 Orang	25.000,000	APBD	1 Kali	1 Kali	26.200,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Pemas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial (Kawakan) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	24 Orang	50.000,000	APBD	1 Kali	1 Kali	51.500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Pemas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial (Kawakan) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	20 Lembaga	31.364,000	APBD	1 Kali	1 Kali	31.912,200	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Pemas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial (Kawakan) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	32 Keluarga	90.000,000	APBD	1 Kelengkapan	1 Kelengkapan	94.500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	2	2.03	01	Facilitasi Pembedayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga atau KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pembedayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	32 Keluarga	90.000,000	APBD	1 Kelengkapan	1 Kelengkapan	94.500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin

1.06.07	PROGRAM PERIBELAJARAN TAMAN MAMAK PAHLAWAN	Taman Mamak Perumahan yang diadiri	1.06.07	81,442,000	APBD	1.06.07	64,514,100	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01	62,442,000	APBD	1.06.07	64,514,100	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
1.06.07.2.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang "terancam" pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Marangin/Kota	1.06.07.2.02	61,442,000	APBD	1.06.07	64,514,100	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERDANGGAL	100%	180,000,000	APBD	100%	180,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.03.2.03	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pemustaka Layanan Pedagogis Persekolahan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pemustaka Persekolahan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	28 Lembaga	180,000,000	APBD	28 Lembaga	180,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.03.2.03.01	Aktivasi Klub dan Pengembangan Pelayanan Persekolahan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Aktivasi Klub dan Pengembangan Pelayanan Persekolahan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	1 Dokumen	122,000,000	APBD	1 Unit	122,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.03.2.03.02	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Pemustaka Layanan Persekolahan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Pemustaka Layanan Persekolahan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	30 Orang	28,000,000	APBD	2 Kali	28,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesiif bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Khusus Kabupaten/Kota	Durasi dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Menyediakan Perempuan Kabupaten/Kota	20 Orang	20,000,000	APBD	50 Orang	21,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.03.2.03.04	Pengujian Jejaring antar Lembaga Pemustaka Layanan Persekolahan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Jejaring antar Lembaga Pemustaka Layanan Persekolahan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	APBD	3 Lembaga	21,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.02	PROGRAM PENGALIH UTMAMA GENDER DAN PEMBIDAYAAN PEREMPUAN	PEREMPUAN PENGALIH UTMAMA YANG MELAKSANAKAN PUGB	100 %	186,465,100	APBD	100 %	206,277,855	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.02.2.01	Koordinasi dan Sinergisasi Pemustaka Kabupaten/Kota	Keingintahnya mengembangkan PUGB	54 PUGB	70,000,000	APBD	54 PUGB	73,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinergisasi Pemustaka Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pemustaka Kabupaten/Kota yang dilaksanakan PUGB	1 Dokumen	70,000,000	APBD	54 PUGB	73,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.02.2.02	Pembudayaan Pemustaka Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Pemustaka Kabupaten/Kota	100 Orang	70,000,000	APBD	100 Orang	73,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.02.2.02.01	Sosialisasi Pengalihan Persekolahan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi Pengalihan Persekolahan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70,000,000	APBD	4 Kali	73,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.02.2.02	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pemustaka Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Pemustaka Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	96,465,100	APBD	6 Lembaga	99,277,855	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Pemustaka Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Pemustaka Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota	30 Orang	96,465,100	APBD	6 Lembaga	99,277,855	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.02.2.02.03	Program Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak	SUDAR BERGEMER DAN TERPILIH DI BERKALA	1 Dokumen	85,179,000	APBD	1 Dokumen	89,437,950	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.02.2.02.04	Penyempurnaan, Pengalihan, Aplikasi dan Penyaliran Data Gender dan Anak dalam Pengembangan Prati di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menyiapkan data yang siap pakai dan dapat digunakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	85,179,000	APBD	1 Dokumen	89,437,950	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	85,179,000	APBD	1 Dokumen	89,437,950	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.06	PROGRAM PEMBERIHAN HAK ANAK (PIHA)	KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	UTAMA	149,821,000	APBD	UTAMA	157,512,050	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.06.2.01	Pembinaan PIHA pada Lembaga Pemustaka Kabupaten/Kota	Jumlah PIHA yang dilaksanakan	50 Lembaga	75,821,000	APBD	50 Lembaga	77,512,050	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinergisasi Pemustaka Persekolahan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pemustaka Persekolahan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	73,821,000	APBD	50 Lembaga	77,512,050	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.06.2.02	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pemustaka Layanan Persekolahan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pemustaka Layanan Persekolahan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	1 Dokumen	76,000,000	APBD	50 Lembaga	79,800,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinergisasi Pemustaka Persekolahan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pemustaka Persekolahan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	76,000,000	APBD	14 Kali	79,800,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
2.06.06.2.02.02.01	Koordinasi dan Sinergisasi Pemustaka Persekolahan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pemustaka Persekolahan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	76,000,000	APBD	14 Kali	79,800,000	Dinas SOSPPA Kab. Marangin
				6,454,281,741			6,468,997,993	

Bangka, 30

Kepala Dinas Studi, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



DR. ALVIS SUTADINATA
NIP. 19640508198031003

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN MERANGIN

KODE	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cetakan Pelting	Praktis Hejre Rencana Tahun 2023		SKPD Penanggungjawab
			Label	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paga Indikatif	Sumber Dana	TARGET Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Paga Indikatif		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
1.06.01.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin	100 %	301,118,000	APBD			106,171,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Merangin	100 Laporan	3,118,000	APBD	1	180 Surat	3,275,800	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Merangin	48 Laporan	79,000,000	APBD	2	12 Bulan	82,950,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	13 Laporan	19,000,000	APBD	3	12 Bulan	19,950,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.06	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Merangin	100 %	393,023,541				412,674,718	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.06.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	18 Unit	6,000,000	APBD	4	18 Jenis	6,300,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	12 Paket	33,963,541	APBD	5	12 Bulan	35,661,718	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Merangin	12 Paket	13,805,000	APBD	6	18 IS	14,495,150	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Merangin	12 Dokumen	19,255,000	APBD	7	31 Media Massa	20,217,750	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat, koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Merangin	120 Laporan	320,000,000	APBD	8	84 Kali	336,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.1	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin		70,000,000				73,500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Merangin	14 Unit	20,000,000	APBD	9	19 Unit	21,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Merangin	8 Unit	40,000,000	APBD	10	15 Unit	42,000,000		
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Merangin	2 Unit	10,000,000	APBD	11	10 Unit	10,900,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin		160,000,000	APBD			168,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	Kab. Merangin	21 Unit	140,000,000	APBD	12	21 Unit	147,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Merangin	17 Unit	20,000,000	APBD	13		21,000,000		

1	06	01	2.1.9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilisasi	Kab. Merauke	1 Unit	APBD	1 Unit	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1		Administratif Kespogawalan Perangkit Daerah	Persentase Disiplin Sembor Daya Manusia	Kab. Merauke	%	326,875,000 APBD		Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.6	02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Merauke	1 Paket	24,675,000 APBD	14	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.6	03	Pendidikan dan Pengabdian Administrasi Kespogawalan	Jumlah Dokumen Pendidikan (dari Pengabdian Administrasi Kespogawalan)	Kab. Merauke	1 Dokumen	283,200,000 APBD	15	
1	06	01	2.1.6	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang mendapat Bimtek	Kab. Merauke	4 Orang	18,000,000 APBD	16	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.2	02	Administratif Keuangan Perangkit Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkit Daerah	Kab. Merauke	%	3,667,785,000 APBD		Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menoroti Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Merauke	30 Orang/12 Bulan	3,500,000,000 APBD	17	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengumpulan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengumpulan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Merauke	12 Dokumen	150,980,000 APBD	18	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Merauke	1 Laporan	6,935,000 APBD	19	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.2	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Kab. Merauke	1 Laporan	9,890,000 APBD	20	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.2	02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkit Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkit Daerah	Kab. Merauke	100%	50,093,000 APBD		Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.3	01	Penyusunan Dokumen Perangkit Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkit Daerah	Kab. Merauke	5 Dok	25,917,000 APBD	21	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RMA SKPD	Jumlah Dokumen RMA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RMA-SKPD	Kab. Merauke	2 Dok	9,472,000 APBD	22	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.1	04	Koordinasi dan Penyusunan DFA SKPD	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD	Kab. Merauke	2 Dok	9,472,000 APBD	23	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahsil Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Tahsil Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahsil Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Merauke	5 Laporan	5,831,000 APBD	24	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.3		Administratif Barang Milik Daerah Pada Perangkit Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkit Daerah	Kab. Merauke		14,000,000 APBD		Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	01	2.1.3	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Merauke	1 Laporan	14,000,000 APBD	25	Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Perentase Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar serta disabilitas lain yang mendapat kesempatan	Kab. Merauke	43.88%	304,713,000		Dinas SOSPPA Kab. Merauke
1	06	04	2.1.1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Galangan Pengemis di Luar Pantol Sosial	Tempat-tempat labuhan dasar penyandang disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Galangan Pengemis di Luar Pantol Sosial	Kab. Merauke	132 Orang	184,713,000 APBD	35,835,008	Dinas SOSPPA Kab. Merauke

1	6	4	2.01	1	Penyediaan Benda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Remedian Sosial dengan Standar GDI Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	132 Orang	28	APBD	36.122,048	132 Orang	37.026,36	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Saclang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Asst. Satu dan Asst. Bantu. Peraga Untuk Meningkatkan Kemampuan Anak Cacat/Orang	Kab. Merangin	132 Orang	27	APBD	34.638,283	132 Orang	36.380,178	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Asst. Bantu	Jumlah Pekerja Pembinaan Sosial Miskin Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta disabilitas pengantar, pengantar dan pengantar (kemampuan kabupaten/kota)	Kab. Merangin	60 Orang	26	APBD	46.837,267	60 Orang	50.339,130	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	04	2.01	05	Pemberian Sumbangan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gelandangan/pengemis dan Mayarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bekerja Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Kab. Merangin	132 Orang	25	APBD	33.915,400	132 Orang	35.511,191	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	1 Dokumen	30	APBD	150.000,000	1 Dokumen	157.500,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	04	2.02	24	Kepuasan Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	1 Dokumen	30	APBD	150.000,000	1 Dokumen	157.500,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	6	6			PROGRAM PERANGKAMAN BERKEMA	Perentase korban bencana dan kelompok rentan yang mendapat kemampuan bertahan hidupnya	Kab. Merangin	20%		APBD	158.967,500	20 %		Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	06	2.01		Perencanaan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	900 Orang		APBD	158.967,500	900 Orang	159.315,605	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Miskin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Remedian Sosial dan dalam Masa Terpapar Duras (Pemeriksaan) secara reguler, 187/2020/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	31	APBD	60.000,000	500 Orang	63.000,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Saclang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan dan Kelembagaan lainnya yang tersedia pada tingkat Daerah (Pengguna) dan pada Berhala Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	32	APBD	48.907,300	500 Orang	49.315,605	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Pemukiman/Pengumpul	Jumlah Tempat Pemukiman/Tempat Pengumpul Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	1 Unit	33	APBD	20.000,000	1 Unit	21.000,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	6	6			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin dan rentan yang mendapat kemampuan dalam meningkatkan kemampuan dasar	Kab. Merangin	6,48 %		APBD	300.846,880	6,48 %		Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	06	2.02		Pengelolaan Dana Rotor Miskin/daerah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	1 Dokumen		APBD	300.846,880	1 Dokumen	318.089,140	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	05	2.02	01	Kelembagaan Rotor Miskin/daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	2000 Orang	34	APBD	200.846,900	2000 Orang	200.889,140	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	05	2.02	03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	500 Keluarga	35	APBD	100.000,000	500 Keluarga	106.000,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	6	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Warga Masyarakat yang mendapat kemampuan dalam meningkatkan kemampuan dasar	Kab. Merangin	90%	80/46	APBD	60.000,000	90/46	63.000,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	1 Dokumen		APBD	60.000,000	1 Dokumen	63.000,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinergis Penelitian dan Lintas Grasis Berbasis dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	1 Dokumen	25/34/2020	APBD	108.364,000	91,87 %	111.882,200	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	02	2.02	03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	3 PPSK	1 Kelurahan	APBD	90.000,000	1 Kelurahan	94.300,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kemitraan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Pelatihan Kapasitas Berhala Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	24 Orang	1 Kali	APBD	25.000,000	1 Kali	26.390,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemitraan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Mendapat Pelatihan Kapasitas Berhala Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	24 Orang	1 Kali	APBD	50.000,000	1 Kali	51.900,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	02	2.03	04	Kesejahteraan Sosial Kemitraan Masyarakat/SDS	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	20 Kelurahan	1 Kali	APBD	31.364,000	1 Kali	32.022,200	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Ades Terpencil (KAT)	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Masyarakat/SDS	Kab. Merangin	22 Kelurahan	1 Kelurahan	APBD	90.000,000	1 Kelurahan	94.500,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin
1	6	2	2.01	01	Facilitasi Pemandirian Sosial KAT	Jumlah Keluaran KAT yang Mendapat Pelatihan Pemandirian Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	32 Kelurahan	1 Kelurahan	APBD	90.000,000	1 Kelurahan	94.500,000	Dinas SOSPPA, Kab. Merangin

1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan yang dilanda	1.0648	81.462,000	APBD	1.0648	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	64.514,100																																																																																														
1	06	07	2.01	Pembinaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pembinaan Rutin Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.0649	81.462,000	APBD	1.0649	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	64.514,100																																																																																													
1	06	07	2.01	2.02	Pembinaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2.0201 Kajian YAC "Pembinaan Makam Pahlawan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota"	1.0648	61.442,000	APBD	1.0648	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	64.514,100																																																																																												
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100%	190.000,000	APBD	100%	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	199.500,000																																																																																														
2	06	03	2.09	Pengakuan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perindungan Perempuan yang Berkesinambungan	26	190.000,000	APBD	26	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	199.500,000																																																																																													
2	06	03	2.03	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan perempuan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan perempuan Kabupaten/Kota	1	132.000,000	APBD	1	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	128.000,000																																																																																												
2	06	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan Kabupaten/Kota	2.0201 Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Perindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan Kabupaten/Kota yang Berkesinambungan	39	28.000,000	APBD	2	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	29.400,000																																																																																												
2	06	03	2.03	03	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam: 01. Sholat danur dan kordisi khusus 02. Pengaturan jadwal anak lembaga penyedia layanan perindungan perempuan Kabupaten/Kota	01.0101 Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam: 01. Sholat danur dan kordisi khusus 02. Pengaturan jadwal anak lembaga penyedia layanan perindungan perempuan Kabupaten/Kota	25	20.000,000	APBD	50	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	21.000,000																																																																																												
2	06	03	2.03	04	Pengaturan jadwal anak lembaga penyedia layanan perindungan perempuan Kabupaten/Kota	04.0101 Pengaturan jadwal anak lembaga penyedia layanan perindungan perempuan Kabupaten/Kota	1	20.000,000	APBD	1	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	21.000,000																																																																																												
2	06	02	PROGRAM PENGABDIAN UTAMA GENDER DAN PERIBENDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGABDIAN UTAMA GENDER DAN PERIBENDAYAAN PEREMPUAN	100%	186.486,300	APBD	100%	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	206.277,855																																																																																														
2	06	02	3.01	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat pada Lembaga Pemantahan Perempuan Kabupaten/Kota	PENGABDIAN PENGABDIAN DAN YANG MELAKUKANNYA	54	70.000,000	APBD	54	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	73.900,000																																																																																													
2	06	02	3.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumuan Kebijakan Perindungan PUG	01.0101 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumuan Kebijakan Perindungan PUG	1	70.000,000	APBD	1	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	73.900,000																																																																																												
2	06	02	3.02	02	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Komunitas Kabupaten/Kota	02.0101 Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Komunitas Kabupaten/Kota	100	70.000,000	APBD	100	Dinas SOSPPPA Kab. Marangin	73.900,000																																																																																												
2	06	02	3.02	01	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Berkeaja
Kesele
Dinas SOSPPPA Kab. Marangin
NIP. 196408041983031003

Lampiran Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEMUDAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

KODE	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cucukan Pening	Problema Maja Rencana Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
			Luas	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paga Indikatif	Sumber Dana	TARGET Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Paga Indikatif		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
1 06 01 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin	100 %	106,173,800	4,782,493,841	4,782,493,841			Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Merangin	100 Laporan	3,118,000	APBD	APBD	180 Surat	3,273,900	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Merangin	48 Laporan	79,000,000	APBD	APBD	12 Bulan	82,850,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	13 Laporan	19,000,000	APBD	APBD	12 Bulan	19,850,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.06	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Merangin	100 %	393,023,841				412,674,718	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.06 1	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	18 Unit	6,000,000	APBD	APBD	18 Jenis	6,300,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	12 Paket	33,983,541	APBD	APBD	12 Bulan	35,461,718	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Merangin	12 Paket	13,805,000	APBD	APBD	18 Es	14,495,250	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Merangin	12 Dokumen	19,255,000	APBD	APBD	31 Media Massa	20,217,750	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Merangin	120 Laporan	320,000,000	APBD	APBD	84 Kali	338,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin		70,000,000				79,500,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Merangin	14 Unit	20,000,000	APBD	APBD	19 Unit	21,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Merangin	8 Unit	40,000,000	APBD	APBD	15 Unit	52,000,000		
1 06 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Merangin	2 Unit	10,000,000	APBD	APBD	10 Unit	10,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin		160,000,000				169,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perishinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perishinannya	Kab. Merangin	21 Unit	140,000,000	APBD	APBD	21 Unit	147,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Merangin	17 Unit	20,000,000	APBD	APBD		21,000,000		

1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Kab. Merangin	1 Unit	-	APBD	-	1 Unit	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penetapan Disiplin Sumber Daya Manusia	Kab. Merangin	%	325,875,000	APBD	342,168,750		Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Pembelian Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Kab. Merangin	1 Paket	24,675,000	APBD	25,908,750	1,26 Stel	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Merangin	1 Dokumen	283,200,000	APBD	297,360,000		
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengikuti bimtek	Kab. Merangin	4 Orang	18,000,000	APBD	18,900,000	16 Orang	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Merangin	%	3,667,785,000	APBD	3,851,174,250		Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Merangin	30 Orang/12 Bulan	3,500,000,000	APBD	3,675,000,000	12 Bulan	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Merangin	12 Dokumen	150,860,000	APBD	158,500,000	12 bulan	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Merangin	1 Laporan	6,935,000	APBD	7,261,750	1 Dok	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Merangin	1 Laporan	9,860,000	APBD	10,384,500	1 Dok	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Merangin	100%	50,692,000	APBD	53,226,600		Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Merangin	5 Dok	25,917,000	APBD	27,212,850	5 Dok	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Merangin	2 Dok	9,472,000	APBD	9,945,600	2 Dok	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Merangin	2 Dok	9,472,000	APBD	9,945,600	2 Dok	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Merangin	5 Laporan	5,831,000	APBD	6,122,350	5 Dok	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Kab. Merangin		14,000,000	APBD	14,700,000		Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Merangin	1 Laporan	14,000,000	APBD	14,700,000	1 Dok	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Perentase Penyandang Disabilitas Terpapar yang mengikuti Ula Terlaris Serta Gelandangan dan Penderita yang berkembang keberagamaan lainnya	Kab. Merangin	43,63%	304,713,000		319,948,650		Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlaris, Anak Terlaris, Lanjut Usia Terlaris, serta Gelandangan Penderita di Luar Pant Sosial	Terpaparnya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlaris, Anak Terlaris, Lanjut Usia Terlaris serta Gelandangan Penderita di Luar Pant Sosial	Kab. Merangin	132 Orang	154,713,000	APBD	162,448,650	132 Orang	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin

1	6	4	2.01	1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan Keburhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gb Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	132 Orang	36,122,046	APBD	132 Orang	37,928,159	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sandang yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	132 Orang	34,838,265	APBD	132 Orang	36,580,178	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Bantu Peraga Sosial Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	60 Orang	49,837,267	APBD	60 Orang	52,329,136	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terantar, Atak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gejalanya Pengemis dan Masyarait	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Atak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gejalanya Pengemis dan Masyarait Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	132 Orang	33,915,420	APBD	132 Orang	36,611,191	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Pantu Sosial	Penerbitan Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemaran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	1 Dokumen	150,000,000	APBD	140 Orang	157,509,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.02	14	Kepasama Antar Lembaga dan Kembaran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemaran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	1 Dokumen	150,000,000	APBD	140 Orang	157,509,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang mendapat kemampuan bertahan hidupnya	Kab. Merangin	20%	126,987,300	APBD	20 %		Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenulihnya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	126,987,300	APBD	500 Orang	133,315,665	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pungutan) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	60,000,000	APBD	500 Orang	63,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pungutan) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		500 Orang	46,967,300	APBD	500 Orang	49,315,665	
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Unit	20,000,000	APBD	500 Orang	21,000,000	
1	6	6			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang mendapat kemandiriannya dalam mengatasi layanan kebutuhan dasar		6,48 %	300,846,800	APBD		315,889,140	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02		Pengalangan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualifikasi data base kemiskinan		1 Dok	300,846,800	APBD	1 Dok	315,889,140	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		2000 Orang	200,846,800	APBD	1 Dok	210,889,140	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02	03	Facilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota		500 keluarga	100,000,000	APBD	1 Kali	106,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		90%	60,000,000	APBD	90%	63,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga KAT yang Meningkatkan Kualitas hidupnya		9,4%	90,000,000	APBD	1 Kelompok	94,500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinonisasi Penriban Zin Undan Gratis Bermahadai dan Pengumpulan Uang Abu Barang	Persentase Warga KAT yang Meningkatkan Kualitas hidupnya		1 Dokumen	60,000,000	APBD	8 Penyelenggara	63,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		5 PSKS	106,364,000	APBD	5 PSKS	111,682,200	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		24 Orang	25,000,000	APBD	1 Kali	26,290,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	02	Pengembangan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		24 Orang	50,000,000	APBD	1 Kali	52,900,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Lembaga	311,364,000	APBD	1 Kali	32,924,200	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatkan kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar		32 Keluarga	90,000,000	APBD	1 Kelompok	94,500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	2	2.01	01	Facilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	32 Keluarga	90,000,000	APBD	1 Kelompok	94,500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin

1	06	07	PROGRAM PENGLOLAAN TAMAN MAMAK PAHLAWAN	Taman Mamak Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	61,442,000	APBD		1 Lokasi	64,514,100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Mamak Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Taman Mamak Pahlawan Patriotik bangko	1 Lokasi	61,442,000	APBD	1 Lokasi	64,514,100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	07	2.01	2	Pemeliharaan Taman Mamak Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah: Halaman yang Teropus Pemeliharaan pada Taman Mamak Pahlawan Nasional	1 Lokasi	61,442,000	1 Lokasi	64,514,100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERENCANAAN, KEBERHASILAN PERENCANAAN DAN ANAK YANG TERTANGANI	100%	190,000,000	APBD	100%	199,500,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Berlingkungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Perempuan yang di Kabupaten/Kota	28 Lembaga	190,000,000	APBD	28 Lembaga	199,500,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	122,000,000	1 Unit	128,100,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pengabdian bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Pengabdian bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	28,000,000	2 Kali	29,400,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebijakan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penerimaan Ketubuhan Perempuan	20 Orang	20,000,000	60 Orang	21,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	5 Lembaga	21,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PPRG	100 %	196,455,100	APBD	100 %	206,277,855	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Menjalankannya kelembagaan PUG	54 PUG	70,000,000	APBD	54 PUG	73,500,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.01	01	Kondisi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70,000,000	54 PUG	73,500,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan, Keasasanaan, Kabupaten/Kota	Menjalankannya kapasitas perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 Orang	70,000,000	APBD	100 Orang	73,500,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.02	01	Sosialisai penguatan, Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Penguatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Dokumen	70,000,000	4 Kali	73,500,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Perempuan yang dilaksanakan	7 Lembaga	54,455,100	APBD	6 Lembaga	59,277,855	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	56,455,100	6 Lembaga	59,277,855	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	JUMLAH DOKUMEN DATA TERJILAH GENDER DAN ANAK YANG DISEDIAKAN	1 Dokumen	85,179,000	APBD	1 Dokumen	89,437,950	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menyajikan data terjiliah gender dan anak sebagai bahan dalam pengambilan keputusan	1 Dokumen	85,179,000	APBD	1 Dokumen	89,437,950	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	85,179,000	1 Dokumen	89,437,950	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	8	6		PROGRAM PENUHUNAN HAK ANAK (PHA)	KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	UTAMA	169,821,000	APBD	UTAMA	157,312,050	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PHA yang ditandatangani	50 Lembaga	73,821,000	APBD	50 Lembaga	77,512,050	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penuhunan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penuhunan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	73,821,000	50 Lembaga	77,512,050	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.02	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fraksional Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup anak	14 Kali	76,000,000	APBD	14 Kali	79,800,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kota dan Kecamatan	1 Dokumen	76,000,000	14 Kali	79,800,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
										6,468,987,983	

Lampiran Tabel 3.2
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
 DAN PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2024**
KABUPATEN MERAINGIN

KODE	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cairan Penting	Prestasi Kerja Rencana Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			3	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
1 06 01 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin	100 %	104,118,000				106,173,900	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Merangin	100 Laporan	3,118,000	APBD		180 Surat	3,273,900	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Merangin	48 Laporan	79,000,000	APBD		12 Bulan	82,950,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	13 Laporan	19,000,000	APBD		12 Bulan	19,950,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Merangin	100 %	394,004,544				412,674,718	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	18 Unit	6,000,000	APBD		18 Jenis	6,300,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Merangin	12 Paket	33,963,544	APBD		12 Bulan	35,661,718	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Merangin	12 Paket	13,805,000	APBD		18 Bks	14,485,200	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Merangin	12 Dokumen	19,255,000	APBD		31 Media Massa	20,217,750	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Merangin	120 Laporan	320,000,000	APBD		84 Kali	336,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin		70,000,000				73,800,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Merangin	14 Unit	20,000,000	APBD		19 Unit	21,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Merangin	8 Unit	40,000,000	APBD		15 Unit	42,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Merangin	2 Unit	10,000,000	APBD		10 Unit	10,800,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Merangin		180,000,000				186,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	Kab. Merangin	21 Unit	140,000,000	APBD		21 Unit	147,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Merangin	17 Unit	20,000,000	APBD			21,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin

1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Merangin	1 Unit	-	APBD		1 Unit		Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin Sumber Daya Manusia	Kab. Merangin	%	325,875,000	APBD			342,168,750	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Merangin	1 Paket	24,075,000	APBD		126 Sbl	25,986,750	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.05	03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Merangin	1 Dokumen	283,200,000	APBD			287,360,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ASN yang mengikuti Blmtek	Kab. Merangin	4 Orang	18,000,000	APBD		16 Orang	18,500,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Merangin	%	3,667,785,000	APBD			3,851,174,250	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Merefina Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Merangin	30 Orang/12 Bulan	3,500,000,000	APBD		12 Bulan	3,675,000,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Merangin	12 Dokumen	150,960,000	APBD		12 bulan	158,508,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Barang/ Jasa/ Hibah/ Dana Bantuan/ Hibah/ Sumbangan/ Sumbatan)	Kab. Merangin	1 Laporan	6,935,000	APBD		1 Dok	7,881,750	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulang/Triduanan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulang/Triduanan/Semesteran SKPD	Kab. Merangin	1 Laporan	9,890,000	APBD		1 Dok	10,384,500	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Merangin	100%	50,892,000	APBD			53,226,600	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Merangin	5 Dok	25,917,000	APBD		5 Dok	27,232,850	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Merangin	2 Dok	9,472,000	APBD		2 Dok	9,945,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Merangin	2 Dok	9,472,000	APBD		2 Dok	9,945,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Merangin	5 Laporan	5,631,000	APBD		5 Dok	6,122,150	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Kab. Merangin		14,000,000	APBD			14,700,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Merangin	1 Laporan	14,000,000	APBD		1 Dok	14,700,000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar Serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberpungutan sosialnya	Kab. Merangin	43.68%	304,713,000				319,948,650	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantai Sosial	Kab. Merangin	132 Orang	154,713,000	APBD		132 Orang	182,448,650	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin

1	6	4	2.01	1	Penyediaan Pemukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gar Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	132 Orang	36,122,048	APBD	132 Orang	37,928,150	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pasokan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	132 Orang	34,838,205	APBD	132 Orang	36,580,178	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dari Alat Bantu Panga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	60 Orang	49,837,267	APBD	60 orang	52,209,130	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Pisyarakat.	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis dan Pisyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	132 Orang	33,915,420	APBD	132 Orang	35,611,191	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napas di Luar Pantil Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan pelayanan dasar	Kab. Merangin	1 Dokumen	150,000,000	APBD	140 Orang	157,500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Komitmen dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama dalam Kerjasama dan Komitmen dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	1 Dokumen	150,000,000	APBD	140 Orang	157,500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya	Kab. Merangin	20%	126,967,300	APBD	20 %		Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	06	2.01		Pertolongan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	126,967,300	APBD	500 Orang	133,315,665	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x Hari dalam Masa Tanggapan Darurat (pemungutan) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	60,000,000	APBD	500 Orang	60,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pasokan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggapan Darurat (Pemungutan) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	46,907,300	APBD	500 Orang	49,315,665	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	1 Unit	20,000,000	APBD	500 Orang	21,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	8			PROGRAM PENLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang meningkat kemampuannya dalam mengatasi layahan kebutuhan dasar	Kab. Merangin	6,48 %	300,846,800	APBD		315,689,140	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	06	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Calupun Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi kualitas data base	Kab. Merangin	1 Dok	300,846,800	APBD	1 Dok	315,689,140	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02	01	Pembinaan Fakir Miskin Cukupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cukupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (DMM) dalam pemenuhan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	2000 Orang	200,846,800	APBD	1 Dok	210,889,140	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02	03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Sember Dana Bantuan Sosial masyarakat yang dilakukakan untuk penyelenggaraan	Kab. Merangin	80%	60,000,000	APBD	80%	63,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PKKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan keaslabarasan sosial	Kab. Merangin	91,67 %	106,364,000	APBD	91,67 %	111,682,200	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggalan PUG dan UGB	Kab. Merangin	1 Dokumen	60,000,000	APBD	8 Penyelinggara	63,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Lindan Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Abu Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Lindan Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Abu Barang	Kab. Merangin	1 Dokumen	60,000,000	APBD	8 Penyelinggara	63,000,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan keaslabarasan sosial	Kab. Merangin	8 PKKS	106,364,000	APBD	5 PKKS	111,682,200	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Hasil Pelatihan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	24 Orang	25,000,000	APBD	1 Kali	26,250,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningat Kapaasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	24 Orang	50,000,000	APBD	1 Kali	52,500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningat Kapaasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	20 Lembaga	31,364,000	APBD	1 Kali	32,932,200	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatkan Kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Kab. Merangin	32 Keluarga	90,000,000	APBD	1 Kelompok	94,500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	6	2	2.01	01	Facilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	32 Keluarga	90,000,000	APBD	1 Kelompok	94,500,000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin

1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1. Lokasi	APBD	1. Lokasi	APBD	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Taman Makam Pahlawan Phalatric Bangko	1. Lokasi	61,442,000	1. Lokasi	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Tahun 1970 Tersebut Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1. Lokasi	61,442,000	1. Lokasi	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERSTANGANI	100%	190,000,000	100%	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	03	2.03	Pengusutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan/Tinglat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengusutan dan pengembangan Lembaga perlindungan Perempuan yang dilaksanakan	26 Lembaga	190,000,000	26 Lembaga	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	03	2.03	Advokat Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Dokumen	122,000,000	1. Unit	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	03	2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perawatan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Perawatan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Menjalani Pelatihan Kapasitas	30 Orang	28,000,000	2 Kali	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	03	2.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Status Darurat dan Nondisabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Daurat dan Nondisabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota yang Menjalani Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	20 Orang	20,000,000	60 Orang	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	03	2.03	Perjuangan Adigring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perjuangan Adigring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Dokumen	20,000,000	5 Lembaga	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	02	2.01	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PENENTAS PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PPG	100 %	196,455,100	100 %	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	02	2.01	Pelembagaan Penguatutamaan Gender pada Lembaga Pemeringkat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kelembagaan PUG	54 PUG	70,000,000	54 PUG	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	02	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Dokumen	70,000,000	54 PUG	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	02	2.02	Revisi Kebijakan dan Etiket pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 Orang	70,000,000	100 Orang	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	02	2.02	Sosialisai dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisai dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Dokumen	70,000,000	4 Kali	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	02	2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Menjalani Pelatihan Kapasitas	7 Lembaga	56,455,100	6 Lembaga	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	JUMLAH DOKUMEN DATA TERPILAH DISEDAJAKAN	1. Dokumen	85,179,000	1. Dokumen	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menyajikan data terpilah gender dan anak sebagai bahan dalam pengambilan keputusan	1. Dokumen	85,179,000	1. Dokumen	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	05	2.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersejua	1. Dokumen	85,179,000	1. Dokumen	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	UTAMA	149,821,000	UTAMA	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	06	2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemeringkat, Kewenangan, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PHA yang ditandatangani	50 Lembaga	73,821,000	50 Lembaga	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	06	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Dokumen	73,821,000	1. Dokumen	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	06	2.02	Pengusutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup anak	14 Kali	76,000,000	14 Kali	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
2	08	06	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengembangan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengembangan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Dokumen	76,000,000	14 Kali	Dinas SOSPPPA Kab. Meringin
							6,454,281,741		6,458,997,963

Bengkong Juni 2022

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

DR. ELVISURYADINATA
NIP. 196405041998031 003

Tabel 11
 Anggaran Belanja dan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama
 dan Kegiatan lainnya yang terkait dengan APBD Tahun 2022
 Program Kerja, Kegiatan, dan Sub-kegiatan

No	Kode	Uraian Kegiatan (sub-kegiatan, kegiatan, dan sub-kegiatan)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja (KPI) 2022 (Rp. juta)	Realisasi Kinerja (KPI) 2022 (Rp. juta)	Rincian Anggaran (Rp. juta)												Sisa Anggaran (Rp. juta)
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	01	
2	02	
3	03	
4	04	
5	05	
6	06	
7	07	
8	08	
9	09	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	

No	Kategori	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Tipe Kegiatan	Masa Pelaksanaan	Rincian Anggaran (Rp)												Total Anggaran (Rp)	Tipe Kegiatan						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A	Kategori 1	Program Pembinaan Sosial	Kegiatan 1	Kegiatan 1	Kegiatan 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	Kategori 2	Program Pembinaan Sosial	Kegiatan 2	Kegiatan 2	Kegiatan 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

No	Kode	Uraian/Detail Usah Peningkatan Sosial dan Program / Kegiatan	Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPJMD) Tahun 2021												Total	Total Bermanfaat (Miliar Rupiah)	Total Capaian Kinerja (Miliar Rupiah)	Total Capaian Kinerja (Persentase)	Total Capaian Kinerja (Miliar Rupiah)	Total Capaian Kinerja (Persentase)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
			2.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
			3.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
			4.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
2	2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
			2.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
			3.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
			4.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
3	3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
			2.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
			3.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			4.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
4	4	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	1.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
			2.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
			3.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			4.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

No	Kode	Uraian Kegiatan/Program/Proyek/Kelembagaan	Tipe	Revisi Anggaran (Rp)										Total Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian Kerja (%)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
A	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	Struktur II	Struktur II	Struktur II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	Struktur III	Struktur III	Struktur III	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D	Struktur IV	Struktur IV	Struktur IV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Kode	Unit/Divisi/Unit Pelaksana Dasar dan Program / Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Program / Kegiatan/Program	Target Fisik (RPT) dan/atau RPT (Jumlah peserta) Tahun (RPT)	Realisasi Capaian Fisik (RPT) di Tahun Pelaksanaan	Realisasi Biaya (Rp) (Miliar)				Realisasi Capaian Energi dan Non-energi Anggaran Tahun (RPT) Mula (RPT)	Target Capaian Energi dan Non-energi Anggaran Tahun (RPT) Mula (RPT)	Kategori
						I	II	III	IV			
<p>TOTAL KEMAJUAN CAPAIAN KINERJA DAN ASYRAFALAH BEKUMI PROGRAM PROSDAM I & II (RUMAH SIA)</p> <p>TOTAL KEMAJUAN CAPAIAN KINERJA DAN ASYRAFALAH BEKUMI PROGRAM PROSDAM I & II (RUMAH SIA)</p>												
<p>TOTAL KEMAJUAN CAPAIAN KINERJA DAN ASYRAFALAH BEKUMI PROGRAM PROSDAM I & II (RUMAH SIA)</p>												

Tanggal: **29 SEPTEMBER 2022**
 Diusung
 oleh: **DR. H. ALLIUS SOPHIA**
 Kepala BPPK BANGKALAYA
